

Katalog: 4102004.14

**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**PROVINSI
RIAU**

2015



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU***



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN
RAKYAT**

**PROVINSI
RIAU**

2015

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI RIAU 2015

ISBN : 978-602-17820-5-7
No. Publikasi : 14520.1605
Katalog BPS : 4102004.14
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 104 halaman

Naskah :
Bidang Statistik Sosial
Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Gambar Kulit :
Bidang Statistik Sosial
Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat

Diterbitkan Oleh :
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

Dicetak Oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2015 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Riau antar waktu dan perbandingannya baik antar kabupaten/kota maupun daerah tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan/*urban-rural*). Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pekanbaru, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Ir. Aden Gultom, MM.

<http://riau.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	ix
Singkatan dan Akronim	xvi
1. Kependudukan	3
2. Kesehatan dan Gizi	19
3. Pendidikan	29
4. Ketenagakerjaan	45
5. Taraf dan Pola Konsumsi	57
6. Perumahan dan Lingkungan	65
Tabel-tabel	75
Daftar Pustaka	83
Istilah Teknis	84

DAFTAR TABEL

Halaman

KEPENDUDUKAN

1.1	Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin, di Riau 2011-2015	5
1.2	Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, di Riau 2011-2015	9
1.3	Persentase Wanita Umur 10+ Tahun Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama, di Riau 2014 dan 2015	11
1.4	Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Alat/Cara KB, di Riau 2014 dan 2015	16

KESEHATAN DAN GIZI

2.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama bulan referensi Menurut Kabupaten/Kota, Tipe Daerah dan Jumlah Hari Sakit di Riau 2014-2015.....	19
2.2	Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Riau Tahun 2014 - 2015.....	20

PENDIDIKAN

3.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, di Riau Tahun 2014 dan 2015	26
3.2	Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, di Riau 2014 dan 2015	29
3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, di Riau 2014 dan 2015	32
3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, di Riau 2014 dan 2015	34

KETENAGAKERJAAN

4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Di Riau 2014 - 2015	38
4.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan di Riau 2014-2015	40
4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, di Riau 2014-2015	42

TARAF DAN POLA KONSUMSI

5.1	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran, di Riau 2014 dan 2015	46
5.2	Rata-Rata Pengeluaran untuk Makanan dan bukan makanan per Kapita Sebulan Menurut Golongan Pengeluaran (Rupiah), di Riau 2014 dan 2015	47
5.3	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Pembagian Pengeluaran/Kapita dan Indeks Gini di Riau 2015.....	49

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, di Riau 2014 dan 2015	53
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Di Riau 2014 dan 2015	55
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, Di Riau 2014 dan 2015	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Riau 2011-2015	19
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Riau , 2015	22
Gambar 1.3 Persentase Wanita yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia 10 Tahun Ke atas, di Riau Tahun 2014-2015	26
Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin di Riau 2014-2015	42
Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Riau, Tahun 2014 dan 2015.....	59
Gambar 5.2 Perkembangan Indeks Gini di Riau, 2013-2015	61

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Raskin	Beras Miskin
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SD	Sekolah Dasar
SM	Sekolah Menengah
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 2015

Kependudukan

Kesehatan dan Gizi

Pendidikan

Ketenagakerjaan

Taraf dan Pola Konsumsi

Perumahan dan Lingkungan



<http://riau.bps.go.id>



1 KEPENDUDUKAN

*S*u kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk Indonesia yang besar, termasuk di Provinsi Riau . Saat ini jumlah penduduk di Provinsi Riau pada tahun 2015 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2010-2020 tercatat sebanyak 6,344 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 156 ribu jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014 yang mencapai 6,188 juta jiwa. Bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011, jumlah penduduk di Riau saat ini mengalami peningkatan sekitar 9,74 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Riau telah mengalami penambahan penduduk sebesar 618 ribu jiwa.

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Riau pada tahun 2015 tercatat sebesar 2,52 persen atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

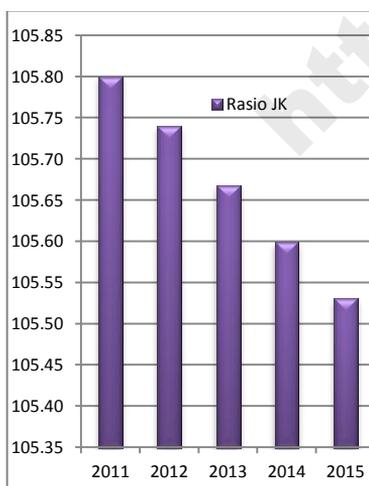
Tabel 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Riau, Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (000) Jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	5.726,24		105,80
2012	5.879,11	2,67	105,74
2013	6.033,27	2,62	105,67
2014	6.188,44	2,57	105,60
2015	6.344,40	2,52	105,53

[Sumber : Proyeksi Penduduk Tahun 2010-2020]

Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk Riau sebesar 2,67 persen dan mengalami penurunan menjadi 2,62 persen pada tahun 2013 dan 2,57 persen pada tahun 2014. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Riau telah menunjukkan arah menuju adanya keberhasilan.

Gambar 1.1. Rasio Jenis Kelamin di Riau, Tahun 2011-2015



Dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, pada periode 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk di 12 kabupaten/kota ada beberapa yang berada di atas laju pertumbuhan penduduk Riau. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Pelalawan (5,24 persen), diikuti Rokan Hulu (4,17 persen), dan Siak (2,88 persen). Sementara itu, kabupaten yang mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (0,67 persen), diikuti Kuantan Singingi (1,18 persen) dan Indragiri Hilir (1,31 persen). Berdasarkan laju pertumbuhan tersebut, perlu menjadi perhatian dari pemerintah bahwa angka pertumbuhan penduduk di Riau tidak homogen.

Hal ini menunjukkan adanya disparitas angka pertumbuhan menurut kabupaten/kota dan kemungkinan adanya perbedaan atau disparitas dalam konteks kebijakan kependudukan. Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, di Riau, rasio jenis kelamin penduduk Riau pada tahun 2015 sebesar 105,53. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 105 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Riau lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Riau, sebagian besar hampir sama di kisaran 105 – 106 dan terjadi pada 5 tahun terakhir ini.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih harus dihadapi nasional dan juga di Riau adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terjadi di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Angka Beban Ketergantungan

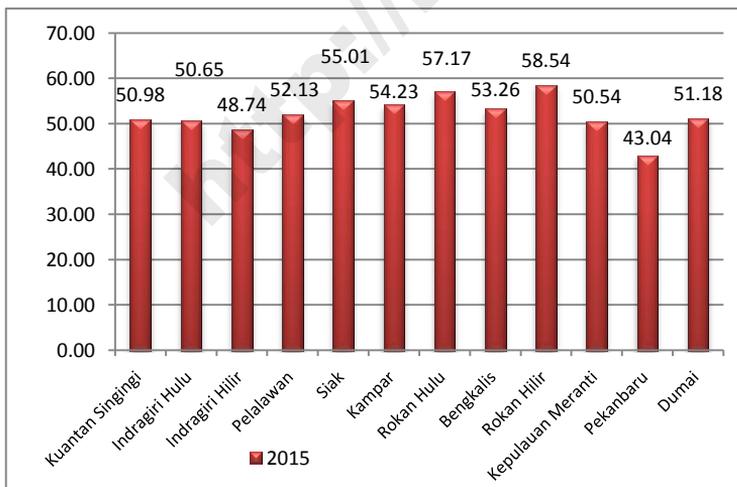
Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2014-2015 angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2014 angka beban tanggungan di Riau sebesar 51,96 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 52 penduduk usia tidak produktif.

Pada tahun 2015 angka beban tanggungan penduduk turun menjadi 51,56 persen artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 51-52 penduduk tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang mereka tidak bekerja. Mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat dimanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Gambar 1.2. Angka Beban Ketergantungan Menurut Kabupaten/Kota di Riau, tahun 2015



Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2014 terdapat sekitar 31,47 persen penduduk berumur 0-14 tahun.

Dari Gambar di atas terlihat bahwa angka beban ketergantungan terendah berada di Kota Pekanbaru 43,04, yang artinya 100 orang usia produktif akan menanggung beban sebanyak 43 orang usia tidak produksi (usia 0-14 tahun dan diatas 65 tahun). Sementara, angka beban ketergantungan tertinggi terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu 58,54.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan, Di Riau, 2014-2015

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 + tahun	Angka Beban Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	31,73	66,30	1,98	50,83
2015	31,47	66,49	2,05	50,40

[Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2020]

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 31,73 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 31,47 persen pada tahun 2015.

Pada Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Riau masih didominasi oleh penduduk usia produktif yang berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2020 mencapai 66,30 persen pada tahun 2014 dan kemudian meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 66,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Riau menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan.

Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 1,98 persen pada tahun 2014 menjadi 2,05 persen pada tahun 2015.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, diantaranya sebagai berikut:

Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Tabel 1.3 Persentase Wanita 10 + tahun pernah kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Riau, Tahun 2014-2015

Kelompok Umur	Perkotaan		Perdesaan		Kota +Desa	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<= 15	4,20	1,93	9,29	4,32	7,39	3,42
16-18	19,37	10,33	30,62	22,78	26,43	18,08
19-24	52,95	66,25	48,54	64,10	50,18	64,91
25+	23,47	21,49	11,55	8,80	16,00	13,59

Sumber: Susenas 2014-2015

Berdasarkan tabel 1.3 usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun. Pada rentang tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar pada kelompok umur 19-24 tahun, dan 25 tahun ke atas mempunyai tingkat fertilitas tertinggi. Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak, karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita sudah sangat baik dan sempurna. Selain itu, tabel tersebut juga menggambarkan bahwa pada tahun 2014 sudah terjadi pergeseran persentase wanita kawin di usia 15 tahun ke bawah dari 7,39 persen pada tahun 2014 menjadi 3,42 persen pada tahun 2015.

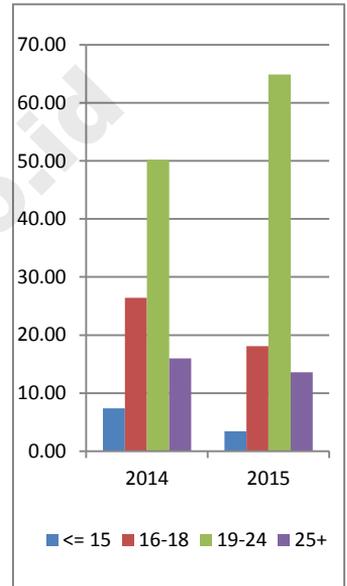
Pergeseran terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan yaitu dari 4,20 persen pada tahun 2014 menjadi 1,93 persen pada tahun 2015 untuk perkotaan dan 9,29 persen tahun 2014 menjadi 4,32 persen tahun 2015 di wilayah pedesaan.

Dilihat berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2015, dari 12 kabupaten/kota di Riau, terdapat 4 kabupaten/kota yang menunjukkan cukup tinggi persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun, dan lebih tinggi dari persentase angka Provinsi Riau.

Persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 6,09 persen diikuti oleh Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 5,42 persen dilanjutkan Kampar dan Indragiri Hulu masing-masing sebesar 4,80 persen dan 4,11 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Kabupaten Bengkalis sebesar 0,50 persen pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan tahun 2014, semua kabupaten/kota menunjukkan penurunan persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya pada usia kurang dari 16 tahun. Secara umum di Riau, sebagian besar wanita yang melakukan perkawinan pertamanya berada pada kelompok usia 19-24 tahun. Hal tersebut juga berlaku pada seluruh kabupaten/kota di Riau.

Gambar 1.3

Persentase Wanita Yang Melakukan Perkawinan Pertama di Usia 10 Tahun Ke atas di Riau Tahun 2014-2015



Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bias dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor. Utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin kecilnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014-2015, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 60 persen yaitu masing masing sebesar 56,29 persen pada tahun 2014 dan 52,19 persen pada tahun 2015. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perdesaan sedikit lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan, yaitu sebesar 59,40 persen pada tahun 2014 kemudian menurun menjadi 57,29 persen pada tahun 2015. Sedangkan wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan kontrasepsi di daerah perkotaan lebih rendah dibanding perdesaan yaitu sebesar 50,91 persen pada tahun 2014 dan 43,66 persen pada tahun 2015. Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB menyebabkan perkembangan cakupan ber-KB dianggap masih lamban sehingga berpengaruh pada laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Sebagian besar masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan menggunakan alat/ cara KB suntik yang trendnya semakin meningkat.

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati. Pada tahun 2014 penggunaan suntikan mencapai 57,67 persen dan meningkat menjadi 59,01 persen pada tahun 2015. Sementara itu, penggunaan pil justru mengalami penurunan dari 27,80 persen pada tahun 2014 menjadi 26,56 persen pada tahun 2015.

Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB, di Riau Tahun 2014 dan 2015

Alat/Cara Kontrasepsi	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
MOW/ tubektomi/MOP/ vasektomi	4,92	5,55	1,15	1,52	2,4	2,78
AKDR/IUD/ spiral	8,22	8,49	1,76	2,10	3,90	4,11
Suntikan KB	48,75	49,79	62,08	63,22	57,67	59,01
Susuk KB/ norplan/ implanon/ alwalit	4,35	4,44	5,56	4,61	5,16	4,55
Pil KB	27,00	25,75	28,20	26,93	27,80	26,56
Kondom/ karet KB	2,98	2,49	0,40	1,03	1,26	1,49
Intervag/Tissue/Kondom Wanita	0,22	0,18	0,04	0,06	0,1	0,10
Cara tradisional	3,57	3,31	0,81	0,53	1,71	1,40

[Diolah dari Hasil Susenas]

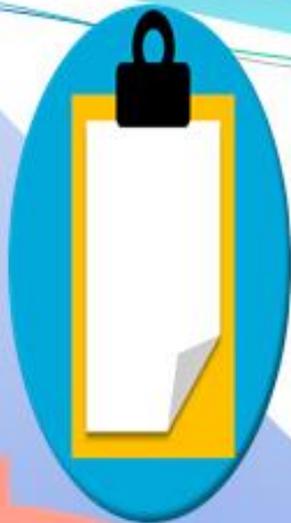
Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah intravag/ tisue/ kondom wanita, MOP/vasektomi/MOP/ vasektomi, dan kondom/ karet, masing-masing persentasenya kurang dari 1 persen. Jika dilihat pertumbuhannya, alat/cara KB yang mengalami pertumbuhan negative/penurunan adalah penggunaan, susuk KB, Pil KB dan cara tradisional.

<http://riau.bps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>



Penduduk Berobat
Jalan ke Puskesmas
Meningkat **0,33**
Persen



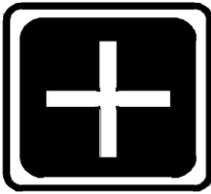
Angka Kesakitan
sebesar **29,71**
Persen



Anak 12-59 bulan telah
mendapatkan imunisasi
wajib lebih dari **90**
persen



<http://riau.bps.go.id>



2. KESEHATAN DAN GIZI

*T*ingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah.

Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit; polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Hasil Susenas tahun 2015 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Riau mencapai 29,71 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 26,19 persen. Angka Kesakitan penduduk tahun 2015 yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan, masing-masing sekitar 30,14 persen dan 29,43 persen. Lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2015 dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan penduduk yang kurang baik, jika diikuti dengan meningkatnya rata-rata lama sakit penduduk. Hasil Susenas tahun 2014 dan 2015 rata-rata lama sakit penduduk berada pada kisaran 5 hari. Selama tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa rata-rata lama sakit penduduk di perdesaan sedikit lebih lama dibandingkan yang tinggal di perkotaan. Persentase lama sakit penduduk yang tinggal di perdesaan pada tahun 2015 terjadi sedikit peningkatan pada lama sakit 4-21 hari dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan hal ini juga terjadi pada perkotaan, pada periode yang sama peningkatan pada lama sakit 4-21 hari.

Pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang

Semakin lamanya kesakitan (jumlah rata-rata hari sakitnya banyak), maka keluhan kesehatan suatu penyakit yang dialami penduduk dapat diasumsikan cukup serius dan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Bulan Referensi menurut Kabupaten/Kota, Tipe Daerah, dan Jumlah Hari Sakit di Riau, 2014-2015

Jumlah Hari Sakit	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ 3	65,34	57,69	56,53	54,43	59,76	55,6
4-7	23,97	30,03	31,65	32,77	28,84	31,78
8-14	4,05	6,05	4,03	5,31	4,04	5,58
15-21	2,01	1,64	2,64	2,81	2,41	2,39
22-30	4,63	4,6	5,15	4,68	4,96	4,65

[Diolah dari Hasil Susenas]

Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakannya dan juga harus melakukan imunisasi, karena hal tersebut merupakan gizi dan imunisasi awal seorang anak dimulai. Kemudian dilanjutkan setelah sang anak lahir dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) sangat dianjurkan untuk diberikan ke pada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Jenis imunisasi ada dua macam yaitu imunisasi pasif yang merupakan kekebalan bawaan pada anak sejak lahir dan imunisasi aktif dimana kekebalan didapat dari pemberian vaksin kepada anak melalui suntik atau tetes. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili dan Hepatitis B.

Tabel 2.2. Persentase Anak Umur 12-59 Bulan yang Pernah Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Riau Tahun 2014 dan 2015

Jenis	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+Pedesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
BCG	91,88	90,52	87,24	87,42	89,04	88,73
DPT	88,63	83,64	85,39	76,10	86,64	79,28
Polio	87,77	91,25	84,77	91,79	85,93	91,56
Campak/Morbili	78,41	71,17	73,56	74,08	75,43	72,85
Hepatitis B	86,42	79,34	80,27	70,44	82,65	74,20

[Diolah dari Hasil Susenas]

Dalam kurun waktu 2 tahun berdasarkan hasil Susenas 2014 dan 2015, mayoritas anak umur 12-59 bulan yang mendapatkan imunisasi wajib sudah mencapai lebih dari 90 persen. Namun, pada balita yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, yang mendapatkan imunisasi DPT, campak dan hepatitis B persentasenya masih di bawah 90 persen.

Pada tahun 2015 peningkatan persentase terjadi pada imunisasi Polio, dimana pada tahun 2015 ada sekitar 91,56 persen balita yang mendapat imunisasi polio sehingga diharapkan balita di Indonesia termasuk Provinsi Riau, tidak ada lagi yang mengalami kelumpuhan akibat penyakit polio. Sementara itu, imunisasi campak sedikit mengalami penurunan menjadi dari 75,43 persen pada tahun 2014 menjadi 72,85 persen pada tahun 2015, begitu juga untuk balita yang pernah mendapat imunisasi lainnya seperti BCG, DPT dan Hepatitis B terjadi penurunan.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik, mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Sebagai dampaknya, akan terlihat berbagai keluhan dan masalah kesehatan segera tertangani lebih cepat dan lebih baik. Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk di perkotaan yang berobat ke fasilitas praktek dokter/klinik pada tahun 2014 sebesar 33,76 persen meningkat menjadi 38,20 persen di tahun 2015.

Penduduk yang berobat jalan ke Puskesmas juga meningkat dari 28,47 persen pada tahun 2014, menjadi 28,80 persen pada tahun 2015. Sementara itu, penduduk yang berobat ke dukun bersalin dan lainnya dan pengobatan tradisional juga mengalami sedikit peningkatan dari 3,36 persen pada tahun 2014 menjadi 3,38 persen pada tahun 2015.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Berdasarkan data Susenas 2015, fasilitas kesehatan yang relatif lebih banyak dimanfaatkan penduduk untuk berobat jalan adalah praktek dokter/bidan (38,20 persen), Puskesmas/Pustu (28,80 persen), dan klinik/praktek dokter bersama (15,49 persen). Begitu juga jika dilihat dari tipe daerah, penduduk perdesaan lebih banyak memanfaatkan praktek dokter/bidan (42,61 persen) dan Puskesmas/Pustu (31,24 persen) dan penduduk perkotaan juga lebih banyak memanfaatkan fasilitas praktek dokter/bidan (31,80 persen) dan Puskesmas/Pustu (23,30 persen).

Sementara itu, penduduk di perdesaan pada tahun 2015 cenderung lebih memilih tempat berobat ke petugas kesehatan yaitu sekitar 36,54 persen dan puskesmas sekitar 30,13 persen, karena kedua fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang mudah dijangkau dan yang tersedia di daerah perdesaan. Selain itu juga persentase penduduk di perdesaan yang berobat ke praktek dokter/ klinik dan pengobatan tradisional secara berturut-turut mengalami peningkatan pada tahun 2013 masing-masing menjadi 19,89 persen dan 2,80 persen. Sementara penduduk yang berobat ke rumah sakit dan dukun bersalin lainnya justru mengalami peningkatan pada tahun 2013.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Daerah dan Tempat Berobat, Riau Tahun 2015

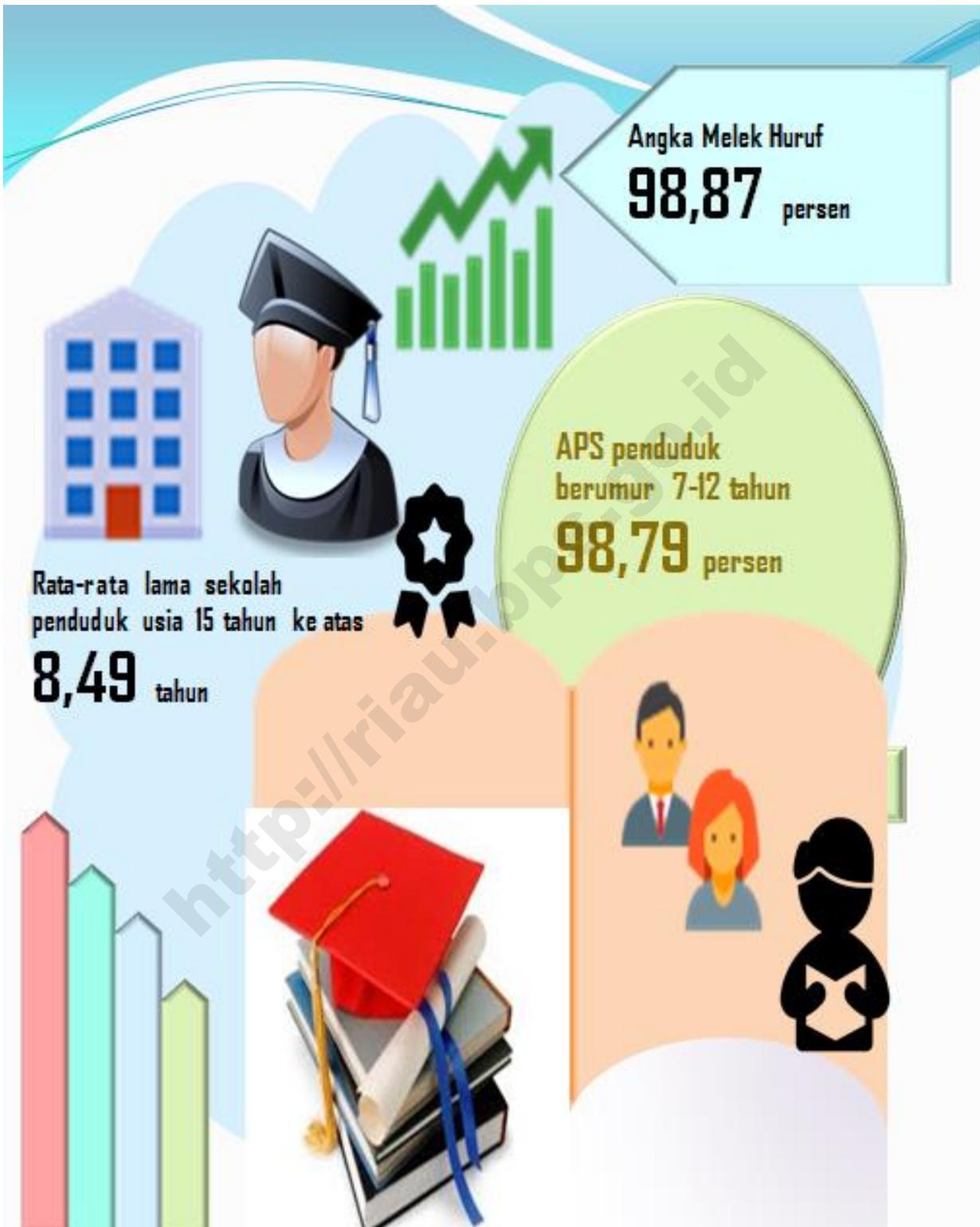
Tempat Berobat	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
RS Pemerintah	11,91	5,02	7,83
RS Swasta	13,67	4,65	8,33
Praktek Dokter/Bidan	31,8	42,61	38,2
Klinik/Praktek Dokter Bersama	19,56	12,68	15,49
Puskesmas/Pustu	25,26	31,24	28,8
UKBM*	1,63	3,44	2,7
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	2,93	3,69	3,38
Lainnya	0,66	1,69	1,27
% Penduduk yang Berobat Jalan	43,85	44,66	45,72
% Penduduk yang tidak berobat jalan	56,15	55,34	54,28

[Diolah dari Hasil Susenas]

Keterangan:

1. Penduduk yang berobat jalan bisa dihitung lebih di satu tempat berobat (Kuesioner VSEN15-K) sehingga persentase di tempat berobat bisa lebih dari 100 persen
2. UKBM* terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

<http://riau.bps.go.id>



<http://riau.bps.go.id>



3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah, Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lain adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumberdaya yang ada di lingkungannya. Bagi pendidikan persekolahan, diharapkan akan mampu menekan angka putus sekolah di pendidikan persekolahan.

Pada tahun 2015, terjadi kenaikan Angka Melek Huruf (AMH) di Riau bila dibandingkan dengan tahun 2014. AMH naik dari 92,97 persen menjadi 93,92 persen. Kenaikan AMH juga menunjukkan bahwa angka buta aksara masyarakat semakin menurun dan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan, walaupun minimal hanya dapat membaca dan menulis. Hal ini juga dapat mencerminkan keberhasilan program pemberantasan buta aksara yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Walaupun program pemberantasan buta aksara telah menunjukkan adanya keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan dan semakin menurun tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat ini, pemerintah lebih optimis angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

AMH penduduk laki-laki pada tahun 2015 sebesar 99,38 persen meningkat jika dibandingkan dengan 2014 yang sebesar 98,28 persen. Sementara itu, pada AMH penduduk perempuan pada tahun 2015 sebesar 97,98 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 98,75 persen. Rata-rata AMH pada tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan AMH tahun sebelumnya.

Tabel 3.1. Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin di Riau, 2014 dan 2015

Jenis		Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Pedesaan	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	Melek Huruf	99,72	99,88	98,98	99,34	98,28	99,55
	Buta Huruf	0,28	0,12	1,02	0,66	1,72	0,45
Perempuan	Melek Huruf	99,28	99,31	97,44	97,39	98,18	98,16
	Buta Huruf	0,72	0,69	2,56	2,61	1,82	1,84
Laki-laki+Perempuan	Melek Huruf	99,51	99,6	98,24	98,4	98,75	98,87
	Buta Huruf	0,49	0,4	1,76	1,6	1,25	1,13

[Diolah dari Hasil Susenas]

Rata-Rata Lama Sekolah

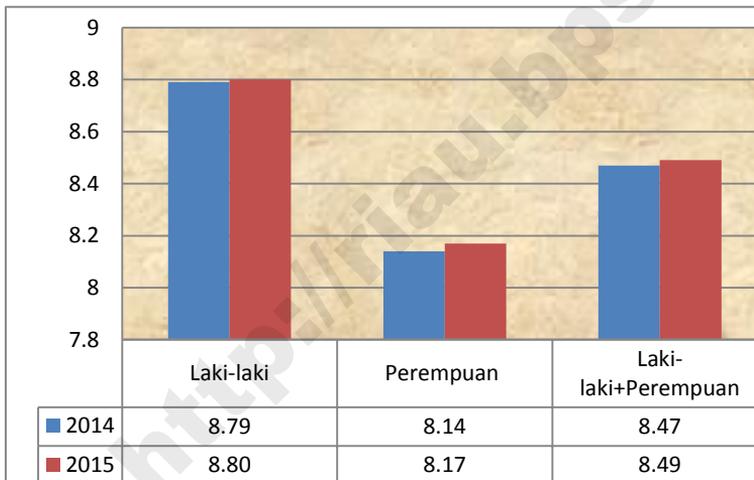
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Sektor pendidikan sendiri menurut data IPM Indonesia (0,617) yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP) pada 2 November 2011 memberikan kontribusi sebanyak 0,58. Oleh karena itu sektor pendidikan memegang peranan penting dalam penghitungan IPM (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/164932>). Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menempuh berbagai upaya dengan meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antarjenjang pendidikan. Salah satu cara paling efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Riau yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah.

Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Secara umum, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Riau pada tahun 2015 sebesar 8,49 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (8,47 tahun).

Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di Riau baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah dikelas 3 SMP. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata penduduk laki-laki baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP (rata-rata lama sekolah 8,49 tahun). Sementara itu, rata-rata penduduk perempuan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP (rata-rata lama sekolah 8,17 tahun).

Gambar 3.1 . Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Menurut Jenis Kelamin di Riau Tahun 2014-2015



Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikannya yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

Dengan semakin meningkatnya keterampilan/keahlian akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Pada tahun 2015, penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas tahun 2015 mencapai 51,91 persen, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 52,03 persen. Penurunan persentase penduduk yang tamat SMP ke atas disebabkan oleh menurunnya penduduk 10 ke atas yang memiliki ijazah SD, serta meningkatnya persentase penduduk tidak memiliki ijazah, dari 47,97 persen menjadi 48,09 persen.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Tingkat Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, di Riau 2014 dan 2015

Ijazah tertinggi yang dimiliki	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan+Pedesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak memiliki	13,74	14,29	25,66	25,48	20,96	21,12
SD/MI/ Paket A	20,00	17,98	31,58	32,73	27,01	26,98
SMP/MTs/ Paket B	18,23	19,11	20,94	20,70	19,87	20,08
SMA/MA/ Paket C	27,71	30,10	15,29	14,92	20,19	20,84
SM Kejuruan	8,96	6,91	2,97	2,36	5,33	4,13
Dipl.I/ Dipl.II	3,57	3,48	1,38	1,45	2,24	2,25
Akademi/ Dipl.III/IV/ S1/ S2/ S3	7,80	8,13	2,18	2,34	4,4	4,60

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan yang telah ditamatkan, secara umum persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah pendidikan mengalami sedikit peningkatan dari 20,96 persen pada tahun 2014 menjadi 21,12 persen pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat bahwa ada penurunan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan, dan perlu perhatian khusus. Diharapkan kesadaran masyarakat ini terus meningkat sehingga mampu menurunkan jumlah masyarakat yang tidak bersekolah. Dengan kata lain, masyarakat yang menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada jenjang pendidikan dasar terjadi penurunan persentase penduduk yang menamatkan SD dan SMP. Pada tahun 2014 persentase penduduk yang menamatkan SD dan SMP masing-masing sebesar 27,01 persen dan 19,87 persen, sedangkan tahun 2015 menurun masing-masing menjadi 26,98 persen dan 20,08 persen. Pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 20,19 persen pada tahun 2014 menjadi sebesar 20,84 persen pada tahun 2015. Sementara, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, tingkat pendidikan yang justru mengalami penurunan. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk di perkotaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada penduduk di perdesaan. Persentase penduduk perkotaan dengan tingkat pendidikan SMP ke atas pada setiap jenjang pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan. Perbedaan yang terlihat mencolok terjadi pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat dan Diploma IV/S1/S2/S3.

Pada tahun 2015 di jenjang pendidikan SMA/Sederajat, sekitar 30,10 persen penduduk di perkotaan dan 14,92 persen penduduk di perdesaan yang menamatkan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat, sedangkan sekitar 8,13 persen di perkotaan mampu menamatkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi Diploma IV/S1/S2/S3 jauh lebih tinggi dari penduduk perdesaan yang hanya sebesar 2,34 persen. Sementara itu, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah (SD, belum tamat SD, dan tidak/belum pernah sekolah) di perdesaan memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Penduduk di perdesaan yang belum menamatkan pendidikan/tidak memiliki ijazah sekitar 25,48 persen, sedangkan di perkotaan hanya sekitar 14,29 persen.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan. Berdasarkan data Susenas tahun 2015, terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua kelompok umur baik di daerah perkotaan maupun perdesaan bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Secara umum APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 98,79 persen pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 yang sebesar 98,67 persen. Sedangkan APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 94,48 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,36 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur berumur 16-18 tahun juga mengalami kenaikan dari 75,30 persen menjadi 75,57 persen. Peningkatan APS pada semua kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, pada tahun 2015 APS penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. APS kelompok umur 7-12 tahun di perkotaan sebesar 99,06 persen sedangkan di perdesaan sebesar 98,63 persen. Sementara itu, APS pada kelompok umur 13-15 tahun di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 96,84 persen dan 93,20 persen. Kesenjangan nampak jelas pada kelompok umur 16-18 tahun yaitu APS di perkotaan sebesar 80,97 persen, sedangkan di perdesaan sebesar 72,19 persen. Pemerintah harus terus meningkatkan akses pendidikan di seluruh wilayah agar lebih merata dan dapat dijangkau bagi masyarakat.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APS penduduk perempuan terlihat lebih baik bila dibandingkan penduduk laki-laki. APS penduduk perempuan pada kelompok 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Sementara untuk APS penduduk laki-laki didominasi pada kelompok umur 7-12 tahun.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)¹⁾ Menurut Usia Sekolah, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, di Provinsi Riau 2014 dan 2015

Kelompok		Perkotaan			Perkotaan +		
					Perdesaan		
Perdesaan		(2)	(3)	(4)	(5)	2014	2015
Umur, Jenis	(1)					(6)	(7)
7-12	L	99,26	99,92	98,72	98,82	98,92	99,21
	P	98,63	98,23	98,27	98,41	98,41	98,34
	L + P	98,95	99,06	98,50	98,63	98,67	98,79
13-15	L	97,20	95,55	92,72	90,80	68,40	69,28
	P	97,52	98,34	92,56	95,69	74,68	75,17
	L + P	97,37	96,84	92,64	93,20	71,44	72,19
16-18	L	80,17	81,20	94,30	92,53	73,31	73,76
	P	82,38	80,75	94,42	96,59	77,57	77,37
	L + P	81,14	80,97	94,36	94,48	75,30	75,57

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan : ¹⁾ Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C)

APS penduduk perempuan tahun 2015 pada kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,34 persen sedangkan APS penduduk laki-laki sebesar 99,21 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun APS penduduk perempuan sebesar 75,17 persen dan penduduk laki-laki sebesar 69,28 persen. Sementara itu, pada kelompok umur 16-18 tahun, APS penduduk perempuan sebesar 77,37 persen berbanding 73,76 persen (APS penduduk laki-laki). Perbedaan APS penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya kesenjangan yang kecil. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa semakin meratanya pendidikan bagi penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Peningkatan APS yang terjadi pada tahun 2015 juga terjadi pada Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan.

Secara umum APM SD sebesar 96,63 persen pada atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 yang sebesar 96,42 persen. APM SMP juga mengalami peningkatan dari 77,67 persen menjadi 78,22 persen. Sama halnya dengan APM SD dan SMP, untuk APM SMA/SMK juga mengalami kenaikan dari 62,31 persen menjadi 62,60 persen. Peningkatan APM di semua jenjang pendidikan didorong oleh meningkatnya APM baik di perkotaan dan perdesaan. Peningkatan APM pada semua jenjang pendidikan tersebut juga menunjukkan bahwa semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal, baik APM SD, SMP maupun SMA di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. APM SD di perkotaan mencapai 96,54 persen sedangkan di perdesaan sebesar 96,68 persen. Sementara itu, APM SMP di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 79,99 persen dan 77,26 persen. Pada APM SD tampak kesenjangan antara APM perkotaan dan APM perdesaan dapat dikatakan kecil dan kesenjangan semakin besar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada APM SMP kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan mencapai 2,73 persen.

Kesenjangan semakin besar pada APM SMA dengan APM perkotaan sebesar 72,11 persen dan APM perdesaan sebesar 56,66 persen sehingga tingkat kesenjangannya mencapai 15,45 persen. Pemerintah diharapkan terus menekan kesenjangan APM pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi antara perkotaan dan perdesaan dengan memberikan kemudahan akses pendidikan di perdesaan.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM SD laki-laki terlihat lebih tinggi bila dibandingkan APM SD perempuan. APM SD penduduk laki-laki sebesar 97,45 persen atau berbeda sedikit dengan perempuan yang sebesar 95,76 persen. Kondisi yang sebaliknya terjadi pada APM SMP. APM SMP penduduk perempuan justru lebih tinggi daripada laki-laki. APM SMP penduduk perempuan tercatat sebesar 82,36 persen dan penduduk laki-laki sebesar 74,39 persen. Sementara itu, pada jenjang pendidikan SMA, APM penduduk perempuan juga menunjukkan kondisi yang lebih tinggi daripada laki-laki. APM penduduk perempuan sebesar 69,92 persen berbanding 55,25persen (APM SMA penduduk laki-laki).

Tabel 3.4. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Riau, Tahun 2014 dan 2015

Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin (1)	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan		
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
SD/MI ¹⁾	L	97,13	96,96	96,65	97,71	96,82	97,45
	P	96,32	96,13	95,83	95,53	96,01	95,76
	L + P	96,72	96,54	96,25	96,68	96,42	96,63
SMP/MTS ²⁾	L	78,21	76,33	72,85	73,27	74,74	74,39
	P	85,72	84,22	77,40	81,39	80,52	82,36
	L + P	82,13	79,99	75,11	77,26	77,67	78,22
SMA/SMK/MA ³⁾	L	65,31	66,99	54,82	48,18	59,20	55,25
	P	69,91	76,98	63,43	65,34	65,86	69,92
	L + P	67,34	72,11	58,99	56,66	62,31	62,60

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan:

¹⁾ Termasuk Paket A ²⁾ Termasuk Paket B ³⁾ Termasuk Paket C

<http://riau.bps.go.id>



Penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja **2,77 juta** orang



Persentase TPAK **63,22** persen, turun **0,09** persen



TPT 7,83

Persen tahun 2015, naik **1,27** persen



<http://riau.bps.go.id>



4 KETENAGAKERJAAN

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2014 dan 2015 kondisi Agustus dan Februari 2015. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, persentase pekerja anak, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Riau pada Agustus 2015 mencapai 2,77 juta orang, bertambah secara absolut sebanyak 76 ribu orang dibanding Agustus 2014 (2,69 juta orang). Kenaikan jumlah angkatan kerja pada periode yang sama ternyata tidak diiringi dengan kenaikan persentase TPAK. Persentase TPAK mengalami penurunan sebesar 0,09 persen, dari 63,31 persen (Agustus 2014) menjadi 63,22 persen pada bulan Agustus 2015, yang artinya kenaikan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) jauh lebih banyak dibandingkan kenaikan penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan perdesaan masing-masing sebesar 62,58 persen dan 63,65 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase TPAK di perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,94 persen, sedangkan TPAK daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di perdesaan lebih banyak terlibat aktif di dunia kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja di perkotaan. Hal ini terjadi karena penduduk usia kerja di perkotaan lebih memilih untuk memiliki bekal pendidikan yang tinggi sebelum terjun ke dunia kerja, sedangkan penduduk usia kerja di pedesaan dapat langsung aktif di dunia kerja karena tidak menuntut adanya pendidikan yang tinggi.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Di Provinsi Riau, Tahun 2014-2015

Daerah Tempat Tinggal	TPAK		TPT	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	61,65	62,58	9,07	9,25
Perdesaan	64,41	63,65	4,97	6,9
Perkotaan+Perdesaan	63,31	63,22	6,56	7,83

[Diolah dari Hasil Sakemas, Agustus]

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2014. TPT di daerah perkotaan pada 2015 naik sebesar 0,18 persen dibandingkan 2014 dari 9,07 persen menjadi 9,25 persen. Sedangkan di perdesaan TPT naik 1,93 persen dari 4,97 persen menjadi di tahun 2014 menjadi 6,90 persen di tahun 2015. Secara keseluruhan TPT di perkotaan dan perdesaan naik sebesar 1,27 persen dari 6,56 persen di tahun 2014 menjadi 7,83 persen di tahun 2015.

Masih cukup tingginya tingkat pengangguran di perkotaan menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia di perkotaan belum mampu menyerap jumlah tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini terkait dengan jumlah lapangan kerja yang terbatas dan adanya kecenderungan penyerapan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Sebagian besar tenaga kerja di perdesaan terserap di sektor pertanian, dimana sektor ini memberikan kesempatan kerja yang lebih luas karena tidak perlu mempunyai keahlian khusus.

Tingginya tingkat pengangguran di perkotaan juga disebabkan urbanisasi yang terjadi sehingga banyak angkatan kerja yang tadinya berada di perdesaan yang pindah ke wilayah perkotaan. Yang menarik adalah terjadinya peningkatan TPT di perdesaan yang memberikan gambaran kemungkinan adanya penyusutan lapangan kerja ataupun peningkatan angkatan kerja di daerah perdesaan. Pada tahun 2015, TPT 3 (tiga) tertinggi terdapat di Kota Dumai sebesar 11,23 persen, dilanjutkan dengan Kabupaten Bengkalis sebesar 10,08 persen dan Kabupaten Siak sebesar 10,02 persen sedangkan TPT 3 (tiga) terendah terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 4,82 persen, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 7,16 persen dan Kota Pekanbaru sebesar 7,46 persen.

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Terjadi pergeseran pola proporsi status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Provinsi Riau pada periode 2014-2015. Berdasarkan status pekerjaan utama, pada tahun 2014, total penduduk Provinsi Riau yang bekerja di dominasi oleh wiraswasta sebesar 46,17 persen. Sementara itu, pada tahun 2015 terjadi pergeseran, yaitu didominasi oleh buruh/karyawan sebesar 46,29 persen. Pekerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap merupakan persentase pekerja terbesar sepanjang tahun 2014 dan 2015 untuk status pekerjaan berusaha/wiraswasta. Dari pola tersebut menggambarkan bahwa jika pada status pekerjaannya didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, maka usaha yang ada di Provinsi Riau lebih banyak dikuasai oleh pihak asing, dan makin berkurangnya penduduk di Provinsi Riau yang menjadi pengusaha.

Untuk itu perlu dikembangkan usaha ekonomi kreatif, dimana dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga tidak bergantung pada upah/gaji yang sewaktu-waktu bisa dihentikan jika perusahaan tersebut terjadi kebangkrutan.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Umur15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Riau, 2014 – 2015

Status Pekerjaan Utama	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Penduduk Bekerja dengan Upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	40,87	46,29
Berusaha/Wiraswasta	46,17	43,72
Pengusaha	4,69	5,07
Berusaha sendiri + Berusaha dibantu buruh tidak tetap	33,95	28,84
Pekerja bebas	7,53	9,81
Pekerja Keluarga	12,95	9,99
Total	100,00	100,00

[Diolah dari Data Sakernas]

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan.

Sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur. Untuk daerah perkotaan kenaikan TPT terjadi pada penduduk yang tidak/belum pernah sekolah yang naik dari 1,45 pada 2014 menjadi 1,72 pada 2015. Hal ini dapat diartikan bahwa lapangan usaha untuk mereka yang tidak/belum bersekolah semakin sedikit. Sama halnya di perdesaan angka TPT untuk mereka yang tidak bersekolah meningkat dari 0,72 persen menjadi 0,92 persen.

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, TPT penduduk dengan pendidikan SMP, SMA dan SMK lebih besar daripada penduduk dengan tingkat pendidikan di atasnya. Pada tahun 2013 TPT penduduk yang berpendidikan SMK di perkotaan mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen dari tahun sebelumnya 9,60 persen menjadi 10,85 persen. Namun TPT penduduk dengan pendidikan Diploma/Akademi mengalami penurunan sebesar 0,74 persen, dari 6,68 persen menjadi 5,94 persen. Ini menunjukkan bahwa lulusan SMK belum/tidak terserap di lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus tersebut menyerap tenaga kerja yang pendidikannya lebih tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan tingkat SMK. Untuk di daerah perdesaan ternyata angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan diploma I/II/III/akademi mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen, dari 4,92 persen di tahun 2012 menjadi 6,21 persen. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMK naik sebesar 1,55 persen, dari 10,66 persen di tahun sebelumnya menjadi 12,21 persen dimana hal ini menjadi peningkatan tertinggi angka TPT di tahun 2013. Hal ini cukup menjadi perhatian dimana lulusan pendidikan dengan keahlian khusus belum banyak terserap oleh lapangan usaha di daerah perdesaan.

Tabel 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, di Provinsi Riau, Tahun 2014-2015

Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/Belum Pernah Sekolah	1,45	1,72	0,72	0,92	1,53	1,01
Tidak/Belum Tamat SD	6,31	8,11	3,6	4,75	4,13	5,42
SD	8,49	6,2	2,54	3,92	3,83	4,41
SMP	7,09	8,93	4,5	6,24	5,36	7,13
SMA	9,61	11,14	10,16	11,87	9,86	11,5
SMK	8,33	9,88	7,51	10,69	8,03	10,17
Diploma I/II/III dan Akademi	10,66	10,33	11,00	12,92	10,81	11,18
Universitas	12,53	7,96	7,21	11,18	10,85	8,97

[Diolah dari Hasil Sakernas]

Angka TPT untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi (Universitas) cenderung menurun di tahun 2015. TPT untuk penduduk yang berpendidikan sarjana di perkotaan menurun sebesar, dari 12,53 persen di tahun 2014 menjadi 7,96 persen di tahun 2015. Namun di perdesaan terjadi peningkatan dari 7,21 persen pada tahun 2014 menjadi 11,18 persen pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana lebih banyak diterima lapangan usaha di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Secara umum TPT penduduk di daerah perdesaan meningkat di semua tingkat jenjang pendidikan, dimana penduduk dengan pendidikan menengah (SMP, SMA, SMK) menjadi kelompok penganggur terbanyak.

Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha sehingga dapat turut serta membangun daerahnya. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

<http://riau.bps.go.id>



Rata-rata
pengeluaran per
kapita sebulan
penduduk
meningkat dari Rp
905.611,- (2014)
menjadi Rp
1.005.509,- (2015).



Pengeluaran makanan
turun dari **51,88**
persen (2014) menjadi
49,26 persen (2015)



Pengeluaran bukan
makanan naik dari
48,12 persen
(2014) menjadi
50,74 persen
(2015)

<http://riau.bps.go.id>



5 TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 5.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Riau, Tahun 2014 dan 2015

Jenis Pengeluaran	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan			
	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	469.871	495.322	51,88	49,26
Bukan Makanan	435.740	510.187	48,12	50,74
Riau	905.611	1.005.509	100,00	100,00

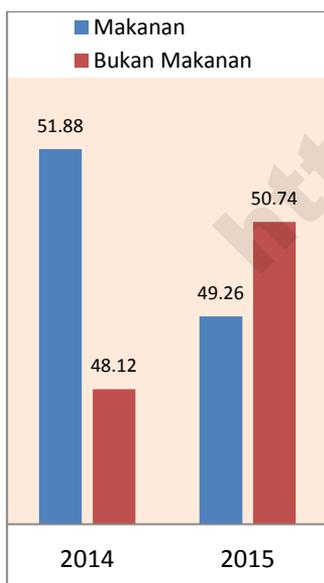
[Diolah dari Hasil Susenas]

Tabel 5.1 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2014 dan 2015. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2014-2015 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 905.611,- menjadi Rp 1.005.509,-. Bila dilihat persentasenya pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan dari 51,88 persen pada tahun 2014 menjadi 49,26 persen pada tahun 2015. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan meningkat dari 48,12 persen menjadi 50,74 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan, artinya orientasi pengeluaran bukan lagi hanya untuk makanan namun sudah untuk konsumsi non makanan yang terdiri dari perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama lainnya dan lain-lain.

Pengeluaran tertinggi untuk konsumsi makanan pada tahun 2015 masih terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti 58,11 persen, diikuti Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 56,46 persen, Bengkalis 54,52 persen dan Rokan Hulu 54,14 persen. Kabupaten/Kota yang persentase pengeluaran untuk makanan berada di bawah 50 persen adalah Kabupaten Kuantan Singingi (49,17 persen); Siak (48,09 persen); Kota Dumai (45,46 persen); dan Kota Pekanbaru (40,20 persen).

Sementara itu, rata-rata pengeluaran untuk makanan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,42 persen dibanding dengan tahun 2014, yaitu dari Rp 469.871,- menjadi Rp 495.322,- per kapita sebulan. Kenaikan ini juga terjadi pada semua golongan pengeluaran kecuali tiga golongan pengeluaran terendah. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2013, rata-rata pengeluaran makanan per kapita di daerah perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Akan tetapi, jika dilihat menurut golongan pengeluaran per kapita, rata-rata pengeluaran per kapita pada golongan pengeluaran antara Rp 150.000,- hingga Rp 199.999,- hanya terdapat di perdesaan, sementara di golongan pengeluaran tersebut, tidak terdapat di perkotaan. Pola konsumsi daerah perkotaan cukup berbeda dengan daerah perdesaan. Untuk daerah perkotaan, rata-rata pengeluaran per kapita/bulan didominasi pada golongan pengeluaran di atas Rp 1.000.000,- yaitu sebesar 41,08 persen pada tahun 2015, sementara untuk daerah perdesaan pengeluaran di dominasi pada golongan pengeluaran Rp 500.000,- sampai dengan Rp 749.000,-. Yaitu sebesar 31,67 persen pada tahun 2015.

Gambar 5.1. Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Riau, Tahun 2014 dan 2015



Tabel 5.2. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita/bulan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita dan Daerah Tempat Tinggal (Rupiah), di Riau, 2014 dan 2015

Golongan Pengeluaran per Kapita	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
150.000 - 199.999	0,00	0,00	0,16	0,23	0,09	0,14
200.000 - 299.999	1,22	1,33	3,02	1,97	2,32	1,72
300.000 - 499.999	19,13	15,69	28,79	21,22	25,00	19,07
500.000 - 749.999	24,32	22,00	31,31	31,67	28,57	27,91
750.000 - 999.999	13,72	19,9	18,39	20,12	16,56	20,03
>= 1.000.000	41,60	41,08	18,34	24,79	27,45	31,12

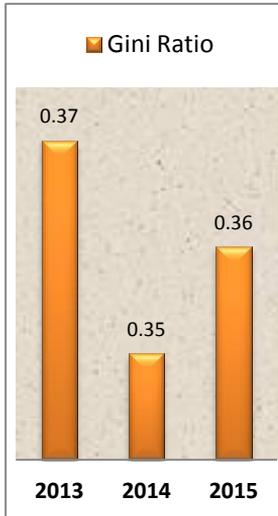
[Diolah dari Hasil Susenas]

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia¹. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia

Gambar 5.2
Perkembangan Indeks
Gini di Riau, 2013-2015



Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini². Dilihat perkembangan perhitungan Indeks Gini di Riau tahun 2013-2015, terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2014, dari 0,37 pada tahun 2013 menjadi 0,35 pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, terjadi sedikit peningkatan menjadi 0,36. Berdasarkan kriteria Bank Dunia terlihat bahwa distribusi pengeluaran pada kelas 40 persen penduduk yang berpengeluaran rendah pada tahun 2015 sebesar 19,42 persen. Menurut kriteria Bank Dunia, keadaan ini menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan pada level sedang. Meskipun tetap pada kategori ketimpangan sedang, pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi atau kelas 20 persen ke atas sebesar 45,03 persen di tahun 2015.

Tabel 5.3. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Menurut Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, di Provinsi Riau 2015

Daerah	2015			Indeks Gini
	MARET			
	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	
Perkotaan	17,83	34,81	47,36	0,39
Pedesaan	21,20	36,66	42,14	0,33
Perkotaan + Pedesaan	19,42	35,56	45,03	0,36

[Diolah dari Hasil Susenas]

¹ Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi,
- memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang,
- memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

² Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi.

<http://riau.bps.go.id>

Tahun 2015, rumah berlantain bukan tanah sebesar 98,77 persen



2015, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 71,56 persen

Rumah tangga di Riau yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 46,50 persen



<http://riau.bps.go.id>



6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

UU No. 1 Tahun 2011 menyebutkan salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri bukan berarti menutup diri tetapi harus membuka diri menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi terhadap status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen no.9 tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standard minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal.

Beberapa diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2015, secara nasional persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2015, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 98,77 persen atau sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 99,03 persen. Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, walaupun sebagian besar rumah tangga sudah menghuni rumah dengan berlantai bukan tanah, namun di daerah perdesaan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah berlantai tanah masih dapat dikatakan lebih banyak daripada di perkotaan yaitu 12,55 persen berbanding 2,90 persen.

Pada tahun 2015 persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, persentase rumah tangga di perdesaan yang bertempat tinggal di rumah berlantai tanah lebih besar daripada di perkotaan

Sementara itu, jika dilihat menurut daerah tempat tinggalnya, pada tahun 2015, kualitas rumah di daerah perkotaan yang beratap layak telah mencapai 99,81 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 96,05 persen. Selanjutnya pada tahun yang sama, kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok dan kayu di daerah perkotaan mencapai 99,82 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 99,22 persen.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya.

**Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Riau,
Di Provinsi Riau, Tahun 2014 dan 2015**

Indikator Kualitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lantai bukan tanah (%)	99,84	99,79	98,51	98,14	99,03	98,77
Atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes (%)	99,78	99,81	96,13	96,05	97,56	97,51
Dinding terluas, tembok dan kayu (%)	99,26	99,82	97,95	99,22	98,46	99,45

[Diolah dari Hasil Susenas]

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001). Pada tahun 2015 luas tempat tinggal cenderung didominasi pada kelompok luas 50-99 m² sebanyak 42,76 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 42,39 persen.

Namun demikian, terdapat peningkatan pada persentase rumah tangga yang menempati luas tempat tinggal pada kelompok luas dibawah 20 m² dari 1,93 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 2,34 persen pada tahun 2015, begitu juga pada kelompok luas tempat tinggal 20-49 m², menurun dari 39,69 persen pada tahun 2014 menjadi 35,91 persen pada tahun 2015.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal . Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Pada tahun 2015, rumah tangga di Provinsi Riau yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum dan masak mencapai 46,50 persen. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibedakan menurut daerah tempat tinggal. Pola penggunaan atau konsumsi air penduduk perkotaan sangat jauh berbeda dengan gaya hidup penduduk yang tinggal di perdesaan. Hal ini terlihat dari rumah tangga di daerah perkotaan dalam mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air dari ledeng yang mencapai 70,65 persen, sementara di perdesaan hanya 31,13 persen.

Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum layak/bersih pada tahun 2015 telah mencapai 74,24 persen. Namun, kekontrasan kembali terjadi pada daerah perkotaan dengan di perdesaan, dimana pada tahun 2015 ada sebanyak 85,83 persen rumah tangga yang telah menggunakan air minum layak/bersih, sementara di perdesaan baru mencapai 66,86 persen, artinya lebih dari 50 persen rumah tangga di perdesaan tidak menggunakan air minum bersih (Tabel 6.2).

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti thypus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Tabel 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2014 dan 2015

Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumber Minum Utama Air kemasan, air isi ulang & ledeng	68,23	70,65	32,36	31,13	46,41	46,50
Air minum Layak/Bersih ¹⁾	86,03	85,83	63,88	66,86	72,55	74,24
Jamban sendiri	92,45	93,33	85,04	84,35	87,94	87,84
Tempat Pembuangan Akhir Tinja berupa Tanki/SPAL	77,09	75,03	35,23	37,05	51,62	51,82
Sumber penerangan Listrik	99,32	99,73	91,69	92,85	94,68	95,52

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan: ¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Selama tahun 2014-2015 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri di daerah perkotaan meningkat dari 92,45 persen menjadi 93,33 persen, namun, di daerah perdesaan sedikit menurun dari 85,04 persen menjadi 84,35 persen. Kebutuhan akan jamban sendiri sudah menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga. Disamping tempat pembuangan akhir tinja juga mempengaruhi factor kesehatan masyarakat. Adanya Tanki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2015 rumah tangga yang menggunakan tangki septik sudah mencapai 51,82 persen atau mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 51,62 persen. Bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, maka di perkotaan memiliki persentase lebih tinggi yaitu sebesar 75,03 persen dibanding di perdesaan yang baru mencapai 37,05 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2015, di Provinsi Riau sebesar 95,52 persen rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014 (94,68 persen). Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, rumah tangga di daerah perkotaan pada tahun 2015 yang sudah menggunakan penerangan listrik sebanyak 99,73 persen, sedangkan di daerah perdesaan baru mencapai 92,85 persen

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, persentase rumah tangga yang memiliki sumber penerangan menggunakan listrik, terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mempunyai persentase lebih besar dari persentase provinsi (95,52 persen) dan 5 (lima) kabupaten/kota berada di bawah persentase provinsi. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang mempunyai persentase terendah (84,34 persen).

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2015, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 71,56 persen, sisanya 19,92 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 14,37 persen kontrak/ sewa, bebas sewa 8,59 persen, rumah dinas 5,11 persen, rumah Dinas 5,11 persen dan lainnya 0,37 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri di perkotaan lebih rendah bila dibandingkan dengan perdesaan yaitu 56,88 persen di perkotaan dan 80,91 persen di perdesaan.

Hal ini dimungkinkan karena harga jual rumah di daerah perkotaan lebih tinggi/mahal daripada di perdesaan sehingga banyak penduduk yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, Di Provinsi Riau, Tahun 2014-2015

Status Kepemilikan Rumah Tinggal	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Milik Sendiri	56,14	56,88	75,78	80,91	68,09	71,56
Kontrak/sewa	31,76	31,53	3,75	3,46	14,72	14,37
Bebas Sewa	9,49	9,83	8,61	7,80	8,95	8,59
Rumah Dinas	2,42	1,58	11,58	7,36	7,99	5,11
Lainnya	0,19	0,19	0,28	0,48	0,25	0,37

[Diolah dari Hasil Susenas]

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kota Pekanbaru adalah kota yang memiliki persentase terkecil untuk rumah tangga yang memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri, yaitu hanya sebesar 45,94 persen.

Sebaliknya, untuk status kepemilikan kontrak/sewa, Kota Pekanbaru justru merupakan kabupaten/kota yang memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 39,98 persen. Hal ini menggambarkan bahwa harga rumah di Kota Pekanbaru sangat tinggi dibandingkan dengan di kabupaten/kota lain, sehingga banyak masyarakat di Pekanbaru cenderung memilih kontrak/sewa.

Kota Pekanbaru adalah Kabupaten/ Kota yang memiliki persentase terkecil untuk rumah tangga yang memiliki status kepemilikan rumah milik sendiri, yaitu hanya 45,94 persen.

<http://riau.bps.go.id>

TABEL-TABEL

<http://riau.bps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>

1

(1) Indikator Kependudukan

kode	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk (000 jiwa)				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kuantan Singingi	294,47	302,63	306,72	310,62	314,28
02	Indragiri Hulu	372,07	383,81	392,35	400,90	409,43
03	Indragiri Hilir	675,90	676,42	685,53	694,61	703,73
04	Pelalawan	329,54	339,87	358,21	377,22	396,99
05	Siak	391,76	404,09	416,30	428,50	440,84
06	Kampar	711,24	733,51	753,38	773,17	793,01
07	Rokan Hulu	507,08	523,02	545,48	568,58	592,28
08	Bengkalis	503,60	519,39	527,92	536,14	543,99
09	Rokan Hilir	574,42	592,40	609,78	627,23	644,68
10	Kepulauan Meranti	177,00	177,59	178,84	179,89	181,10
71	Pekanbaru	929,25	958,35	984,67	1.011,47	1.038,12
73	Dumai	259,91	268,02	274,09	280,11	285,97
	Riau	5.726,24	5.879,11	6.033,27	6.188,44	6.344,40

[Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010 - 2020]

1

(2) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur					
	0-14		15-64		65+	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kuantan Singingi	29,74	29,42	66,05	66,24	4,21	4,34
2 Indragiri Hulu	30,96	30,67	66,19	66,38	2,85	2,95
3 Indragiri Hilir	29,65	29,36	67,05	67,23	3,30	3,40
4 Pelalawan	32,76	32,52	65,55	65,73	1,69	1,75
5 Siak	33,82	33,56	64,32	64,51	1,87	1,93
6 Kampar	32,60	32,33	64,65	64,84	2,74	2,84
7 Rokan Hulu	34,06	33,78	63,43	63,62	2,51	2,59
8 Bengkalis	32,10	31,80	65,05	65,25	2,85	2,95
9 Rokan Hilir	34,67	34,39	62,88	63,07	2,45	2,54
10 Kepulauan Meranti	29,55	29,22	66,24	66,43	4,22	4,35
71 Pekanbaru	27,77	27,54	69,76	69,91	2,46	2,55
73 Dumai	31,55	31,26	65,94	66,15	2,50	2,59
Riau	31,49	31,23	65,81	65,98	2,71	2,79

[Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010 - 2020]

1

(3) Indikator Kependudukan

kode	Kabupaten/Kota	Laju pertumbuhan penduduk per tahun (%)			
		2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kuantan Singingi	2,77	1,35	1,27	1,18
02	Indragiri Hulu	3,16	2,23	2,18	2,13
03	Indragiri Hilir	0,08	1,35	1,33	1,31
04	Pelalawan	3,13	5,40	5,31	5,24
05	Siak	3,15	3,02	2,93	2,88
06	Kampar	3,13	2,71	2,63	2,57
07	Rokan Hulu	3,14	4,29	4,23	4,17
08	Bengkalis	3,13	1,64	1,56	1,46
09	Rokan Hilir	3,13	2,93	2,86	2,78
10	Kepulauan Meranti	0,33	0,71	0,59	0,67
71	Pekanbaru	3,13	2,75	2,72	2,63
73	Dumai	3,12	2,26	2,20	2,09
	Riau	2,67	2,62	2,57	2,52

[Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010 – 2020]

1

(4) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Kuantan Singingi	105,82	105,72	105,68	105,52	105,54
2 Indragiri Hulu	105,78	105,78	105,64	105,60	105,53
3 Indragiri Hilir	105,84	105,72	105,65	105,61	105,52
4 Pelalawan	105,81	105,79	105,75	105,58	105,44
5 Siak	105,78	105,77	105,72	105,64	105,49
6 Kampar	105,77	105,74	105,68	105,60	105,56
7 Rokan Hulu	105,79	105,73	105,71	105,59	105,49
8 Bengkalis	105,82	105,71	105,66	105,62	105,49
9 Rokan Hilir	105,82	105,68	105,64	105,57	105,54
10 Kepulauan Meranti	105,73	105,80	105,80	105,61	105,61
71 Pekanbaru	105,79	105,75	105,61	105,60	105,61
73 Dumai	105,84	105,69	105,60	105,65	105,47
Riau	105,80	105,74	105,67	105,60	105,53

[Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010 - 2020]

1

(5) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama							
	<= 15		16-18		19-24		25+	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1 Kuantan Singingi	14,53	5,42	32,58	20,67	42,68	63,98	10,21	9,93
2 Indragiri Hulu	10,78	4,11	31,05	21,72	45,2	62,86	12,98	11,31
3 Indragiri Hilir	13,33	6,09	30,63	22,49	44,75	61,16	11,30	10,26
4 Pelalawan	10,62	2,99	31,99	20,27	46,12	65,95	11,27	10,79
5 Siak	5,12	2,98	24,56	15,10	55,96	65,03	14,36	16,89
6 Kampar	9,11	4,80	26,92	19,50	54,18	65,31	9,79	10,40
7 Rokan Hulu	8,41	3,85	39,6	21,68	43,17	66,16	8,83	8,32
8 Bengkalis	5,14	0,50	28,33	14,24	52,45	73,10	14,09	12,16
9 Rokan Hilir	5,8	3,28	29,61	24,09	53,42	62,21	11,17	10,42
10 Kepulauan Meranti	6,05	1,16	27,03	13,89	46,79	70,06	20,13	14,90
71 Pekanbaru	3,49	1,87	15,25	10,11	58,35	62,42	22,91	25,60
73 Dumai	9,53	2,40	30,53	12,70	47,26	69,11	12,68	15,80
Riau	9,29	3,42	30,62	18,08	48,54	64,91	11,55	13,59

[Diolah dari Hasil Susenas]

1

(6) Indikator Kependudukan

Kabupaten/Kota		Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun yang sedang menggunakan Alat Kontrasepsi (KB) Menurut Daerah Tempat Tinggal					
		Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Kuantan Singingi	49,61	44,88	57,90	61,76	56,72	59,29
2	Indragiri Hulu	66,11	63,57	65,02	52,69	65,26	55,06
3	Indragiri Hilir	55,43	42,76	58,92	59,77	58,40	57,23
4	Pelalawan	49,37	44,29	59,58	57,98	57,47	54,84
5	Siak	56,25	47,51	55,74	59,96	55,95	54,75
6	Kampar	52,21	40,14	60,66	60,89	58,80	56,29
7	Rokan Hulu	61,40	50,26	61,64	55,74	61,61	55,03
8	Bengkalis	47,95	54,41	59,96	55,09	54,25	54,75
9	Rokan Hilir	50,10	37,36	56,19	53,60	54,93	50,26
10	Kepulauan Meranti	48,50	49,45	55,59	54,26	53,40	52,79
11	Pekanbaru	48,53	39,94	43,43	54,12	48,42	40,29
12	Dumai	46,47	36,55	59,25	49,28	50,87	40,75
	Riau	50,91	43,66	59,40	57,29	56,29	52,19

[Diolah dari Hasil Susenas]

2

(1) Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota		Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Daerah Tempat Tinggal					
		Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Kuantan Singingi	34,92	24,78	32,67	25,99	32,99	25,81
2	Indragiri Hulu	18,41	23,69	27,58	24,92	25,40	24,64
3	Indragiri Hilir	37,5	44,74	34,25	40,58	34,75	41,21
4	Pelalawan	37,42	30,00	29,19	24,40	31,00	25,63
5	Siak	29,88	22,17	21,76	24,69	25,22	23,62
6	Kampar	22,63	30,45	19,06	27,79	19,89	28,40
7	Rokan Hulu	34,93	26,87	19,04	24,65	21,26	24,95
8	Bengkalis	20,85	22,39	23,3	38,47	22,07	30,48
9	Rokan Hilir	27,26	26,57	26,94	25,03	27,01	25,37
10	Kepulauan Meranti	25,16	45,79	34,04	31,33	31,13	36,02
11	Pekanbaru	25,14	33,28	37,79	60,89	25,37	33,93
12	Dumai	24,46	27,55	31,9	36,09	26,81	30,26
	Riau	26,11	30,14	26,25	29,43	26,19	29,71

[Diolah dari Hasil Susenas]

2

(2) Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan					
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kuantan Singingi	54,32	43,53	54,41	42,62	54,39	42,75
2 Indragiri Hulu	38,47	34,46	40,38	34,12	40,05	34,20
3 Indragiri Hilir	28,06	22,59	28,69	33,25	28,58	31,49
4 Pelalawan	48,66	43,03	43,35	50,74	44,76	48,76
5 Siak	44,47	42,93	56,36	61,20	50,35	53,93
6 Kampar	50,18	53,38	54,05	62,83	53,02	60,49
7 Rokan Hulu	49,04	41,86	33,24	40,87	36,87	41,01
8 Bengkalis	66,09	53,26	40,12	51,28	52,40	52,01
9 Rokan Hilir	46,18	47,15	41,43	36,71	42,50	39,10
10 Kepulauan Meranti	52,47	39,63	39,79	32,33	43,15	35,34
11 Pekanbaru	46,6	50,35	44,85	51,96	46,55	50,42
12 Dumai	56,3	55,53	42,32	54,10	51,05	54,98
Riau	48,18	47,34	41,44	44,66	44,07	45,72

[Diolah dari Hasil Susenas]

2

(3) Indikator Kesehatan dan Gizi

Kabupaten/kota	Tempat/Cara Berobat											
	RS Pemerintah		RS Swasta		Praktek Dokter/Bidan		Klinik/Praktek Dokter Bersama		Puskesmas/Pustu		Praktek Pengobatan Tradisional/AI ternatif	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Kuantan Singingi	4,18	11.60	2,58	7.18	31,09	46.28	16,79	13.42	43,75	27.21	8	9.77
2 Indragiri Hulu	5,6	8.45	4,42	4.33	40,24	46.05	29,28	20.38	31,34	18.70	5,9	1.59
3 Indragiri Hilir	4,33	3.44	0,61	0.81	31,83	40.67	34,18	9.86	28,57	33.14	3,87	9.90
4 Pelalawan	1,38	4.47	12,94	10.11	45,38	30.08	19,13	22.90	22,87	32.12	1,3	2.16
5 Siak	4,75	7.47	9,1	8.31	25,34	26.58	46,43	12.60	22,7	38.01	3,49	2.41
6 Kampar	4,71	5.80	6,62	5.08	41,43	52.62	23,56	13.16	24,11	24.33	1,59	2.07
7 Rokan Hulu	8,9	9.07	8,29	14.82	23,85	46.77	18,23	13.72	41,31	18.99	5,82	2.85
8 Bengkalis	9,12	11.77	6,57	6.51	41	35.23	22,16	8.64	22,16	35.47	4,29	1.21
9 Rokan Hilir	4,97	8.43	3,55	8.32	19,87	39.71	27,81	14.65	43,54	24.98	1,82	2.93
10 Kep. Meranti	7,38	13.06	2,91	0.00	29,69	18.86	53,82	7.89	8,43	58.45	0,48	0.48
71 Kota Pekanbaru	7,22	8.20	16,14	16.87	37,92	29.81	22,13	22.38	22	25.01	2,68	2.84
73 Kota Dumai	9,33	9.39	2,55	1.31	29,5	35.90	33,19	20.32	27,81	32.66	1,76	2.26
Riau	5,87	7,83	7,29	8,33	33,76	38,2	27,08	15,49	28,47	28,80	3,36	3,38

[Diolah dari Hasil Susenas]

2

(4) Indikator Kesehatan dan Gizi

Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong proses kelahiran anak lahir hidup yang terakhir?									
	Dokter kandungan	Dokter umum	Bidan	Perawat	Tenaga kesehatan lainnya	Dukun beranak/paraji	Lainnya	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	
1	Kuantar Singingi	26,62	4,00	57,69	0,00	0,00	11,70	0,00	100,00
2	Indragiri Hulu	23,98	0,69	55,20	1,17	0,00	18,96	0,00	100,00
3	Indragiri Hilir	1,67	0,77	68,94	0,00	0,00	28,03	0,59	100,00
4	Pelalawan	23,18	1,78	55,40	1,02	0,00	18,62	0,00	100,00
5	Siak	28,07	4,33	64,06	1,19	0,00	0,92	1,44	100,00
6	Kampar	18,49	5,43	66,43	0,00	0,00	9,65	0,00	100,00
7	Rokan Hulu	17,78	0,00	72,94	0,00	0,00	9,28	0,00	100,00
8	Bengkalis	19,51	0,93	70,86	1,25	0,00	7,44	0,00	100,00
9	Rokan Hilir	14,07	0,00	73,47	0,94	0,69	9,46	1,37	100,00
10	Kep Meranti	8,04	0,00	55,90	0,00	0,00	36,06	0,00	100,00
71	Pekanbaru	46,98	0,00	51,00	0,00	0,00	2,02	0,00	100,00
73	Dumai	19,93	3,91	74,83	0,00	0,00	1,33	0,00	100,00
	Riau	23,00	1,78	63,72	0,40	0,06	10,75	0,29	100,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

2

(5) Indikator Kesehatan dan Gizi

		Berapa berat anak lahir hidup yang terakhir ketika dilahirkan?								
Kabupaten/Kota		Perkotaan			Perdesaan			Kota+Desa		
		< 2,5 kg	>= 2,5 kg	Tidak tahu	< 2,5 kg	>= 2,5 kg	Tidak tahu	< 2,5 kg	>= 2,5 kg	Tidak tahu
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kuantan Singingi	0,00	84,09	15,91	13,85	77,26	8,90	11,45	78,44	10,11
2	Indragiri Hulu	7,47	92,53	0,00	14,06	71,92	14,02	12,43	77,03	10,54
3	Indragiri Hilir	0,00	84,75	15,25	13,27	71,24	15,49	11,63	72,91	15,46
4	Pelalawan	13,17	82,05	4,78	21,38	71,90	6,73	18,93	74,92	6,15
5	Siak	13,73	84,08	2,19	15,91	82,43	1,66	14,94	83,17	1,90
6	Kampar	16,98	83,02	0,00	10,43	88,38	1,19	12,15	86,97	0,88
7	Rokan Hulu	10,78	89,22	0,00	15,34	84,66	0,00	14,74	85,26	0,00
8	Bengkalis	8,58	91,42	0,00	9,87	90,13	0,00	9,10	90,90	0,00
9	Rokan Hilir	23,94	76,06	0,00	11,58	83,79	4,64	14,06	82,24	3,71
10	Kep Meranti	7,84	81,67	10,49	15,42	72,82	11,75	13,42	75,16	11,42
71	Pekanbaru	11,93	88,07	0,00	0,00	100,00	0,00	11,68	88,32	0,00
73	Dumai	3,69	96,31	0,00	13,40	84,15	2,46	7,43	91,62	0,95
	Riau	11,32	87,29	1,38	13,61	80,60	5,79	12,68	83,33	4,00

[Diolah dari Hasil Susenas]

3

1) Indikator Pendidikan

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, Provinsi Riau, 2015									
	Tidak Mempunyai Ijazah		SD		SMP		SMA/SMK/MA/MAK		DI/DII/DIII/DIV/Universitas	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Kuantan Singingi	14,82	23,19	27,71	27,04	24,85	20,41	26,07	20,61	6,56	8,75
2 Indragiri Hulu	15,92	21,71	32,06	28,99	21,72	18,10	24,64	22,32	5,66	8,88
3 Indragiri Hilir	22,47	27,37	38,03	32,82	19,44	21,61	16,24	13,86	3,81	4,34
4 Pelalawan	13,99	16,74	28,84	29,32	22,68	23,42	29,07	25,78	5,43	4,74
5 Siak	6,60	8,26	22,70	28,42	26,55	24,53	38,18	29,69	5,96	9,10
6 Kampar	8,04	12,82	25,73	25,26	27,75	26,73	32,02	25,18	6,45	10,01
7 Rokan Hulu	13,66	19,68	31,21	31,31	26,96	25,97	24,06	16,28	4,11	6,76
8 Bengkalis	13,16	15,67	26,52	24,26	19,73	25,57	35,49	26,22	5,11	8,28
9 Rokan Hilir	15,12	18,90	32,04	33,17	26,22	24,00	23,00	18,49	3,61	5,44
10 Kep Meranti	23,66	31,85	32,04	26,34	19,35	16,76	19,37	19,58	5,58	5,47
71 Pekanbaru	4,97	6,55	12,52	10,80	18,45	21,57	50,03	43,23	14,03	17,85
73 Dumai	10,47	11,60	19,49	20,88	23,28	22,47	40,39	36,03	6,38	9,02
Riau	12,52	16,37	26,49	25,43	22,94	23,10	31,40	25,93	6,65	9,16

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan: L: Laki-laki, P: Perempuan

3

(2) Indikator Pendidikan

Kabupaten/Kota		Angka Partisipasi Sekolah							
		7 – 12		13 – 15		16 – 18		19 – 24	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Perkotaan	Laki-laki	99,26	99,92	97,20	95,55	80,17	81,20	38,14	34,32
	Perempuan	98,63	98,23	97,52	98,34	82,38	80,75	34,44	42,21
	Laki-laki dan Perempuan	98,95	99,06	97,37	96,84	81,14	80,97	36,44	38,18
Perdesaan	Laki-laki	98,72	98,82	92,72	90,80	68,40	69,28	14,99	14,21
	Perempuan	98,27	98,41	92,56	95,69	74,68	75,17	13,83	14,93
	Laki-laki dan Perempuan	98,50	98,63	92,64	93,20	71,44	72,19	14,45	14,56
Perkotaan dan Perdesaan	Laki-laki	98,92	99,21	94,30	92,53	73,31	73,76	25,59	22,95
	Perempuan	98,41	98,34	94,42	96,59	77,57	77,37	23,19	26,84
	Laki-laki dan Perempuan	98,67	98,79	94,36	94,48	75,30	75,57	24,48	24,85

[Diolah dari Hasil Susenas]

3

(3) Indikator Pendidikan

Kabupaten/Kota		Angka Partisipasi Murni (%)					
		SD		SMP		SMA/SMK	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Perkotaan	Laki-laki	97,13	96,96	78,21	76,33	65,31	66,99
	Perempuan	96,32	96,13	85,72	84,22	69,91	76,98
	Laki-laki dan Perempuan	96,72	96,54	82,13	79,99	67,34	72,11
Perdesaan	Laki-laki	96,65	97,71	72,85	73,27	54,82	48,18
	Perempuan	95,83	95,53	77,40	81,39	63,43	65,34
	Laki-laki dan Perempuan	96,25	96,68	75,11	77,26	58,99	56,66
Perkotaan dan Perdesaan	Laki-laki	96,82	97,45	74,74	74,39	59,20	55,25
	Perempuan	96,01	95,76	80,52	82,36	65,86	69,92
	Laki-laki dan Perempuan	96,42	96,63	77,67	78,22	62,31	62,60

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan : Termasuk pendidikan non-formal (Paket A, Paket B dan Paket C)

3

(4) Indikator Pendidikan

Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Kabupaten/Kota, dan Status Pendidikan (%)

Kabupaten/Kota	Masih bersekolah											Tidak Bersekolah Lagi
	Tidak/ belum pernah Sekolah		SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA		Diploma I s.d Univ			
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(14)	(15)
01 Kuantan Singingi	2,84	1,76	7,85	7,75	5,24	6,83	5,03	4,96	2,13	2,18	76,9	76,53
02 Indragiri Hulu	4,31	4,36	8,23	8,75	6,82	6,06	5,51	4,90	2,21	1,80	72,93	74,12
03 Indragiri Hilir	4,02	3,29	8,64	8,69	6,89	7,50	4,01	3,05	0,97	1,15	75,48	76,32
04 Pelalawan	4,36	2,90	9,59	9,30	6,07	6,47	3,48	3,41	1,04	0,93	75,46	76,99
05 Siak	2,12	1,48	9,2	9,42	8,49	7,39	4,47	5,20	1,12	1,42	74,59	75,10
06 Kampar	0,72	1,19	9,05	9,05	6,93	6,86	5,64	5,53	3,88	2,73	73,78	74,64
07 Rokan Hulu	1,6	1,61	9,65	9,58	6,97	7,14	5,12	4,32	2	1,83	74,65	75,52
08 Bengkalis	3,09	3,04	9,31	9,24	7,34	7,25	5,63	4,67	2,21	2,12	72,41	73,68
09 Rokan Hilir	2,21	2,71	9,27	9,50	7,78	7,83	6,32	5,47	1,61	1,05	72,81	73,44
10 Kep Meranti	5,2	8,26	8,16	7,51	7,71	7,71	6,11	5,45	2,67	2,10	70,14	68,97
71 Pekanbaru	0,89	0,51	7,54	6,47	5,49	5,43	4,27	5,18	9,64	10,53	72,17	71,89
73 Dumai	0,93	1,50	7,66	7,45	6,12	6,44	6,33	5,34	3,13	3,00	75,83	76,26
Riau	2,36	2,25	8,68	8,52	6,76	6,81	5,04	4,77	3,35	3,26	73,81	74,39

[Diolah dari Hasil Susenas]

4

(1) Indikator Keternagakerjaan

Kabupaten/Kota	TPAK / LFPR (%)			TPT / OUR (%)		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kuantan Singingi	67.05	62.89	67.16	3.92	6.13	2.60
2 Indragiri Hulu	62.57	63.04	66.76	3.82	3.97	4.82
3 Indragiri Hilir	69.34	59.70	63.84	2.98	4.27	7.16
4 Pelalawan	65.24	67.61	64.76	2.97	3.42	7.61
5 Siak	61.90	61.45	60.57	5.38	3.56	10.02
6 Kampar	63.23	62.78	59.44	6.20	6.10	8.07
7 Rokan Hulu	59.61	63.37	65.41	5.04	7.90	7.82
8 Bengkalis	60.63	70.61	65.43	7.02	7.30	10.08
9 Rokan Hilir	61.15	61.76	56.53	6.04	6.25	8.62
10 Kepulauan Meranti	70.54	68.82	69.29	6.99	11.76	9.37
71 Kota Pekanbaru	62.01	61.30	63.04	6.66	9.20	7.46
73 Kota Dumai	64.14	65.26	66.94	9.60	9.14	11.23
Riau (Kondisi Agustus)	63.44	63.31	63.22	5.48	6.56	7.83

[Diolah dari Hasil Sakernas Agustus]

Catatan/Note: TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /Labour Force Participations Rate)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka/ Open Unemployment Rate)

5

(1) Taraf dan Pola Konsumsi

Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran Per kapita per bulan Menurut Kelompok Jenis (Rupiah)					
	Makanan		Non Makanan		Total Pengeluaran	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kuantan Singingi	493.546	503.123	413.988	520.175	907.534	1.023.299
2 Indragiri Hulu	433.716	465.679	368.550	463.304	802.266	928.984
3 Indragiri Hilir	448.448	456.383	327.468	351.954	775.916	808.337
4 Pelalawan	557.233	561.125	537.890	491.439	1.095.124	1.052.564
5 Siak	467.721	475.776	424.547	513.661	892.268	989.437
6 Kampar	424.100	485.201	362.270	465.609	786.370	950.810
7 Rokan Hulu	411.733	492.005	306.881	416.010	718.614	908.015
8 Bengkalis	468.347	474.537	403.171	395.895	871.518	870.432
9 Rokan Hilir	391.708	427.751	299.764	375.926	691.472	803.677
10 Kepulauan Meranti	377.611	375.457	269.142	270.675	646.753	646.131
71 Kota Pekanbaru	590.721	593.172	762.863	882.473	1.353.584	1.475.645
73 Kota Dumai	479.722	511.316	461.705	613.344	941.427	1.124.660
Riau	469.871	495.322	435.740	510.187	905.610	1.005.509

[Diolah dari Hasil Susenas]

5

(2) Taraf dan Pola Konsumsi

Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Pengeluaran Per kapita per bulan Menurut Kelompok Jenis (%)			
	Makanan <i>Food</i>		Non Makanan <i>Non Food</i>	
	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kuantan Singingi	54,38	49,17	45,62	50,83
2 Indragiri Hulu	54,06	50,13	45,94	49,87
3 Indragiri Hilir	57,80	56,46	42,20	43,54
4 Pelalawan	50,88	53,31	49,12	46,69
5 Siak	52,42	48,09	47,58	51,91
6 Kampar	53,93	51,03	46,07	48,97
7 Rokan Hulu	57,30	54,18	42,70	45,82
8 Bengkalis	53,74	54,52	46,26	45,48
9 Rokan Hilir	56,65	53,22	43,35	46,78
10 Kepulauan Meranti	58,39	58,11	41,61	41,89
71 Kota Pekanbaru	43,64	40,20	56,36	59,80
73 Kota Dumai	50,96	45,46	49,04	54,54
Riau	51,88	49,26	48,12	50,74

[Diolah dari Hasil Susenas]

5

(3) Taraf dan Pola Konsumsi

Kelompok Barang	Distribusi Pengeluaran per Kapita per bulan menurut Kelompok Barang					
	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. MAKANAN/Food						
1. Padi-padian	5,26	4,82	9,80	8,79	7,57	6,96
2. Umbi-umbian	0,46	0,47	0,62	0,74	0,54	0,62
3. Ikan	5,67	4,68	7,00	5,91	6,35	5,35
4. Daging	2,21	1,98	2,19	2,07	2,20	2,03
5. Telur dan Susu	3,42	3,46	3,39	3,3	3,41	3,37
6. Sayur-sayuran	3,74	2,84	5,93	4,64	4,86	3,81
7. Kacang-kacangan	0,76	0,63	1,01	0,97	0,88	0,81
8. Buah-buahan	2,84	2,26	2,92	2,18	2,88	2,22
9. Minyak dan Lemak	1,64	1,45	2,57	2,38	2,11	1,95
10. Bahan Minuman	1,25	1,15	2,25	2,13	1,76	1,67
11. Bumbu-bumbuan	0,67	0,63	1,15	1,26	0,91	0,97
12. Konsumsi Lainnya	0,83	0,79	1,07	1,07	0,95	0,94
13. Makanan dan Minuman Jadii	11,6	13,29	8,04	9,78	9,79	11,4
14. Tembakau dan Sirih	6,39	6,07	8,92	8,1	7,68	7,17
Jumlah Makanan	46,74	44,51	56,87	53,32	51,88	49,26
B. BUKAN MAKANAN						
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga/	21,62	28,24	17,41	24,37	19,48	26,16
2. Aneka Barang dan Jasa	21,05	13,82	15,85	10,27	18,41	11,9
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	4,41	3,78	3,49	3,64	3,94	3,71
4. Barang yang Tahan Lama	3,1	5,77	3,38	5,18	3,24	5,45
5. Pajak dan Premi Asuransi	2,23	2,54	1,24	1,5	1,73	1,98
6. Keperluan Pesta dan Upacara	0,86	1,33	1,77	1,73	1,32	1,54
Jumlah Bukan Makanan	53,26	55,49	43,13	46,68	48,12	50,74
Jumlah Total	100	100	100	100	100	100

[Diolah dari Hasil Susenas]

6

(1) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/kota		Persentase Rumah tangga Menurut Kabupaten/Kota dan luas tempat tinggal (m2)									
		<=19		20-49		50-99		100-149		>=150	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	Kuantan Singingi	1,47	0,94	34,11	32,01	43,81	47,67	14,86	14,34	5,74	5,04
2	Indragiri Hulu	1,28	0,75	33,34	37,53	54,31	51,06	8,18	6,98	2,90	3,68
3	Indragiri Hilir	2,12	2,13	32,48	29,62	50,16	49,74	11,65	12,77	3,59	5,74
4	Pelalawan	1,23	0,92	57,16	54,57	29,94	36,91	7,73	4,62	3,94	2,97
5	Siak	1,04	0,49	50,08	40,02	37,87	45,03	8,06	10,67	2,96	3,79
6	Kampar	0,69	1,40	44,28	28,78	42,04	45,10	8,21	17,43	4,78	7,29
7	Rokan Hulu	1,41	1,66	39,58	32,42	44,88	48,57	10,13	12,41	4,01	4,94
8	Bengkalis	0,44	0,50	33,08	30,92	44,93	48,16	18,08	12,64	3,47	7,78
9	Rokan Hilir	1,01	3,44	40,52	45,95	46,28	36,30	8,11	9,47	4,07	4,83
10	Kepulauan Meranti	0,75	0,00	33,82	31,99	48,77	47,54	10,19	9,14	6,46	11,33
71	Kota Pekanbaru	5,23	6,70	38,83	36,61	33,50	31,19	14,78	15,34	7,67	10,16
73	Kota Dumai	2,35	1,31	37,51	34,36	41,98	39,04	11,40	16,41	6,75	8,89
Provinsi Riau		1,93	2,34	39,69	35,91	42,39	42,76	11,21	12,50	4,78	6,49

[Diolah dari Hasil Susenas]

6

(2) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/kota		Rumahtangga dengan Beberapa Indikator Perumahan (%)					
		Lantai Bukan Tanah		Atap Beton, Sirap, Genteng dan Asbes		Dinding Tembok dan Kayu	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Kuantan Singingi	98,89	99,53	99,81	97,9	100	99,48
2	Indragiri Hulu	97,42	97,14	98,48	99,02	98,53	99,88
3	Indragiri Hilir	99,87	99,11	87,83	87,18	93,76	99,37
4	Pelalawan	99,62	99,26	97,07	99,24	98,95	99,35
5	Siak	99,39	99,3	99,5	99,54	99,18	99,36
6	Kampar	99,6	99,35	99,72	100	98,51	99,62
7	Rokan Hulu	97,67	97,77	99,89	99,99	99,46	99,22
8	Bengkalis	99,53	99,65	98,49	97,57	99,4	99,46
9	Rokan Hilir	97,11	96,06	99,37	97,53	97,1	98,45
10	Kepulauan Meranti	99,85	99,99	85,33	88,53	100	99,78
71	Kota Pekanbaru	100	99,85	99,73	100	99,88	99,85
73	Kota Dumai	97,98	97,91	99,37	99,82	99,45	99,78
Riau		99,03	98,77	97,57	97,51	98,46	99,45

[Diolah dari Hasil Susenas]

6

(3) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Rumahtangga dengan Beberapa Indikator Perumahan (%)						
Kabupaten/kota	Rumah tangga dengan Sumber Air Minum Bersih* (%)		Rumah tangga dengan Jamban yang dilengkapi tangki septik (%)		Rumah tangga dengan Sumber Penerangan Listrik (%)	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 Kuantan Singingi	52,31	56,51	28,13	21,01	97,60	98,73
2 Indragiri Hulu	59,05	60,65	49,19	46,41	93,05	95,42
3 Indragiri Hilir	85,86	92,02	11,29	15,88	79,79	84,35
4 Pelalawan	59,49	60,57	40,24	45,74	88,76	92,24
5 Siak	74,02	71,32	65,82	61,17	96,74	95,07
6 Kampar	71,15	64,46	75,03	75,87	99,20	98,09
7 Rokan Hulu	54,85	64,29	28,36	34,71	95,60	96,83
8 Bengkalis	79,57	78,64	24,21	31,59	98,26	96,98
9 Rokan Hilir	65,37	72,35	37,42	41,14	95,85	96,07
10 Kepulauan Meranti	80,21	88,56	29,36	15,79	88,99	91,37
71 Kota Pekanbaru	88,57	88,42	97,74	94,17	99,84	99,86
73 Kota Dumai	72,41	72,72	78,16	74,16	97,61	98,83
Riau	72,55	74,24	51,62	51,82	94,68	95,52

[Diolah dari Hasil Susenas]

Catatan/Note : ¹⁾ Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) > 10 m

6

(4) Indikator Perumahan dan Lingkungan

Kabupaten/kota		Rumah tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal 2015					
		(%)					
		Milik sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kuantan Singingi	83,51	3,25	5,62	7,51	0,11	
2	Indragiri Hulu	84,88	5,43	8,32	1,15	0,23	
3	Indragiri Hilir	85,44	4,72	7,83	1,59	0,43	
4	Pelalawan	60,98	16,32	5,27	15,98	1,45	
5	Siak	72,07	12,82	6,00	7,91	1,19	
6	Kampar	75,91	6,51	9,69	7,89	0,00	
7	Rokan Hulu	77,81	6,22	7,95	6,79	1,23	
8	Bengkalis	78,96	13,80	6,52	0,72	0,00	
9	Rokan Hilir	74,09	6,18	8,72	11,02	0,00	
10	Kepulauan Meranti	94,05	2,74	3,22	0,00	0,00	
71	Pekanbaru	45,94	39,98	13,46	0,61	0,00	
73	Dumai	57,95	30,56	9,69	1,68	0,12	
Riau		71,56	14,37	8,59	5,11	0,37	

[Diolah dari Hasil Susenas]

<http://riau.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- 2014 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2015**
(Berdasarkan Data Susenas 2014)
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2014 **Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2015/2016**
(Berdasarkan Data Susenas 2015)
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- 2010 **Proyeksi Penduduk Provinsi Riau 2010-2020**
Jakarta: Badan Pusat Statistik
- 2015 **Indikator Pasar Tenaga Kerja di Riau 2015**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik – Provinsi Riau
- 2014 **Keadaan Angkatan Kerja Di Riau Agustus 2014**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik – Provinsi Riau
- 2015 **Riau Dalam Angka 2015**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik - Provinsi Riau
- 2015 **Keadaan Angkatan Kerja Di Riau Agustus 2015**
Pekanbaru : Badan Pusat Statistik – Provinsi Riau

Istilah Teknis

Air Minum Bersih

Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.

Angka Beban Tanggungan

Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.

Angka Harapan Hidup pada waktu Lahir

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Bayi

Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)

Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.

Angka Kelahiran Total

Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.

Angka Kelahiran Kasar

Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.

Bekerja

Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).

Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.

Indeks Gini

Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Jumlah Jam Kerja Seluruhnya

Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan ini mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah

Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Penganggur

Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.

Pengangguran Terbuka

Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah :

- a. yang mencari pekerjaan
- b. yang mempersiapkan usaha
- c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
- d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Pekerja Tidak Dibayar

seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji

Perkotaan

Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional

penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistem skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)

Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di satu daerah pada waktu tertentu.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Tamat Sekolah

Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase

<http://riau.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI RIAU 2015

Pengarah : Ir. Aden Gultom, MM

Editor : Siti Mardiyah, MA

Penulis : Dyah Budiyanji, S.ST
Metalia Alfa, S.ST
Ifra Wanita, S.ST
Raswandi, SP
Elly Yuliasuti

Pengolahan Data / Penyiapan Draft : 1. Dyah Budiyanji, S.ST
2. Metalia Alfa, S.ST

<http://riau.kps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>

<http://riau.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU**

Jl. Pattimura No. 12, Pekanbaru, 28131

Telp: (761) 23042-21336, Fax: (0761) 21336

Homepage: <http://riau.bps.go.id>, Email: bps1400@bps.go.id